

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN

Journal of Economics and Management

ISSN 1411-5794

Volume 7, Nomor 2

Juni 2006

Pengaruh *Economic Value Added (EVA)*, Ukuran Perusahaan (*Size*), dan *Debt Equity of Ratio (DER)* terhadap Nilai Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Usman Hamid

Analisis tentang Pilihan Pekerjaan antara PNS dengan Wirausaha

Amiartuti Kusmaningtyas

Gaya Kepemimpinan Transformasional: Konsep dan Aplikasinya dalam Upaya Membangun Komitmen Karyawan

Zainuddin Ismail

***Word of Mouth (WOM)* dalam Industri Jasa: Kaitannya dengan Sikap dan Kemungkinan Membeli**

Meirani Harsasi

✓ **Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang**

Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir

Technical Efficiency of Soybean Production in East Java before and after Training of Integrated Pest Management

Joko Mariyono dan Heru Setyoko

Pengaruh *Leverage*, Likuiditas, Saham Publik, *Size* dan Komisaris Independen terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan

Mujiyono dan Magdalena Nany

Analisis Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Kebijakan Utang terhadap Nilai Perusahaan

Muslimin

Perdagangan Lintas Batas dan Masyarakat di Wilayah Perbatasan

Marthin Billa

JEM	Vol. 7	No. 2	Hlm. 153-308	Malang Juni 2006	ISSN 1411-5794
-----	--------	-------	--------------	---------------------	-------------------

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN

(Journal of Economics and Management)

Terhitung sejak tahun 2005 *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* terbit tiga kali setahun (**Februari, Juni dan Oktober**) ISSN: 1411-5794, berisi tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, resensi buku dan tulisan praktis dalam bidang ekonomi dan manajemen.

Jurnal Ekonomi dan Manajemen telah terakreditasi sebagai Jurnal/ Majalah ilmiah berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 39/DIKTI/Kep/2004 Tanggal 10 November 2004

Ketua Penyunting

Abdul Halim

Wakil Ketua Penyunting

Teguh Prasetyo

Penyunting Pelaksana

Djuni Farhan

Nurhanifam

Sugeng Mulyono

Umi Muawanah

Penyunting Ahli

Bambang Subroto (Guru Besar FE-Universitas Brawijaya Malang)

Amiruddin Umar (Guru Besar FE-Universitas Airlangga Surabaya)

J.G. Nirbito (Guru Besar FE-Universitas Negeri Malang)

Dyah Sawitri (Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang)

Jose Rizal Joesoef (Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang)

Mitra Bestari

Supriyanto (Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Penyunting Tamu

Suroso Imam Zadjuli (Guru Besar FE-Universitas Airlangga Surabaya)

Prijono Tjiptohariyanto (Guru Besar FE-Universitas Indonesia)

Pelaksana Tata Usaha

Ronny Hendra Hertanto

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Manajemen (MM) Universitas Gajayana Malang, Jl. Mertojoyo Blok L, Malang 65144, Indonesia. Telepon (0341) 562411, Fax. (0341) 582168. E-mail: jurnaluniga@telkom.net.

JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN (JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT) diterbitkan oleh Program Studi Magister Manajemen (MM) Program Pasca Sarjana Universitas Gajayana Malang.

JURNAL**EKONOMI DAN MANAJEMEN***Journal of Economics and Management*

Volume 7, Nomor 2

Juni 2006

DAFTAR ISI

Pengaruh <i>Economic Value Added (EVA)</i> , Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>), dan <i>Debt Equity of Ratio (DER)</i> terhadap Nilai Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ) <i>Usman Hamid</i>	153-165
Analisis tentang Pilihan Pekerjaan antara PNS dengan Wirausaha <i>Amiartuti Kusmaningtyas</i>	166-173
Gaya Kepemimpinan Transformasional: Konsep dan Aplikasinya dalam Upaya Membangun Komitmen Karyawan <i>Zaimuddin Ismail</i>	174-180
Peran <i>Servicescapes</i> di Wisata <i>Leisure</i> <i>Moh. Raharso dan Sri Raharso</i>	181-185
Analisis tentang Pentingnya Etika dalam Kegiatan Bisnis <i>Asykuri</i>	186-189
<i>Word of Mouth (WOM)</i> dalam Industri Jasa: Kaitannya dengan Sikap dan Kemungkinan Membeli <i>Meirani Harsasi</i>	190-197
Responsibilitas dan Akuntabilitas Birokrasi di Era Otonomi Daerah <i>M. Mustofa</i>	198-204
Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Pengendalian Pusat Biaya <i>Ali Kesuma</i>	205-213
Pemikiran tentang Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia <i>R. Wahjoedi</i>	214-219
Berbagai Tipe Teknologi Komputer yang Dibutuhkan untuk Mendukung Sistem Informasi Kerja Kelompok: suatu Persepsi Mengenai Manfaat Skenario Pendukung dan Peralatan Pemakai <i>Irwansyah</i>	220-230
Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang <i>Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir</i>	231-240

Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang

Abdul Halim
Jamal Abdul Nasir

Abstract: Target of this research is to study: (1) situation and growth of area finance; (2) source of acceptance PAD; (3) constraints faced in order to optimal of acceptance PAD; and (4) efforts which require to be done in order to optimal of acceptance PAD. Result of this research is that: (1) realization APBD during five the last year of goals, but its growth is downhill; (2) ability PAD to sustain the area expenditure relative still lower; (3) realization PAD during five the last year of goals, but its growth is downhill; (4) PAD most sustained by tax and area retribution; (5) causing not yet its optimal is acceptance PAD for example: (a) still not yet its realistic in determination of goals PAD, (b) still height mount the leakage and getting away, (c) decrease it type of acceptance object; and (6) efforts which require to be done by for example: (a) cause not yet its his optimal is acceptance PAD, (b) do the effort of intensification and extensification of tax and area retribution, (c) do the management BUMD professionally and its organization chart outside local government.

Keywords: area finance, PAD, APBD

Pencanangan kebijakan untuk memperbesar dan memperkuat otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada prinsipnya merupakan hasil dari bekerjanya dua kekuatan. *Pertama*, kekuatan internal dalam negeri berupa gerakan reformasi yang dilakukan oleh segenap masyarakat di tanah air dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang kehidupan. *Kedua*, kekuatan supra nasional berupa globalisasi dengan berbagai konsekuensi dan implikasinya yang memerlukan *respon* dalam negeri melalui proses penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan demokratik di tingkat lokal.

Salah satu hal menonjol di bidang keuangan publik sebelum diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut adalah terjadinya hubungan yang sangat asimetris antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditandai dengan sangat tergantungnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Meskipun Pemerintah

Daerah sebenarnya diperkenankan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mengembangkannya karena selain secara administrasi relatif sulit, sumber penerimaan utama telah dimonopoli oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Undang-undang tersebut, kewenangan daerah menjadi sangat luas. Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain yang strategis. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Di samping kewenangan sektoral, daerah juga mempunyai wewenang dalam mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan. Selanjutnya, daerah yang memiliki laut juga memiliki wewenang

dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.

Namun demikian, untuk menyelenggarakan otonomi secara luas khususnya dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya dalam otonomi daerah bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun penerimaan daerah yang dimaksud terdiri dari empat komponen utama, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang syah.

Devas (1999) menyatakan bahwa kewenangan Daerah Tingkat II menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumbangan dari atas, yaitu: 73% dari anggaran rutin dan 87% dari anggaran pembangunan berasal dari pemerintah pusat. Dari penerimaan Daerah Tingkat II secara keseluruhan, sumber PAD sendiri menyumbang 10%. Sementara itu, Hoessein (2000) menyatakan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah.

Apabila kesimpulan tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada saat ini di Pemerintah Kota Malang, menurut Susilo & Halim (2002) dalam penelitiannya menyimpulkan, antara lain bahwa: (1) pengeluaran Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan yang semakin meningkat mengharuskan penerimaan PAD harus dioptimalkan penggalannya; (2) realisasi penerimaan PAD cenderung menurun; dan (3) PAD Pemerintah Kota Malang belum bisa diharapkan untuk dijadikan tumpuan dalam mencukupi kebutuhan dana untuk pengeluaran daerah.

Untuk menghindari persoalan pembiayaan dalam otonomi daerah di masa-masa yang akan datang, Pemerintah Kota Malang perlu melangkah untuk melakukan upaya-upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari PAD.

METODE

Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, bersumber dari Dispenda, Bagian Keuangan, dan Bappeda Pemerintah Kota Malang diperoleh melalui

pencatatan. Data tersebut meliputi: (1) data tentang APBD lima tahun terakhir; (2) data tentang penerimaan keuangan daerah bersumber dari PAD lima tahun terakhir; (3) data tentang PAD lima tahun terakhir; (4) data pertumbuhan PAD per jenis objek penerimaan lima tahun terakhir; dan (5) data tentang pengeluaran daerah lima tahun terakhir.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
- Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Teknik Analisis

Setelah data-data tersebut diperoleh, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif (Nazir, 1998), yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek. Tujuannya adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Langkah-langkahnya sebagai berikut.

- Menganalisis terjadinya selisih antara target dan realisasi pendapatan keuangan daerah.
- Menganalisis terjadinya selisih antara target dan realisasi penerimaan keuangan daerah bersumber dari PAD.
- Menganalisis terjadinya selisih antara target dan realisasi PAD.

- Menganalisis pertumbuhan PAD per jenis objek penerimaan.
 - Menganalisis kontribusi masing-masing jenis objek dalam PAD terhadap PAD itu sendiri.
 - Menganalisis kontribusi PAD terhadap pengeluaran daerah.
 - Menganalisis kontribusi PAD terhadap APBD.
- Dari hasil analisis tersebut selanjutnya disimpulkan dan direkomendasikan kepada pihak Pemerintah Kota Malang untuk dilakukan rencana tindak.

HASIL

Target dan Realisasi serta Pertumbuhan APBD Tahun 2000–2004

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD dibiayai dari APBD. Informasi mengenai target dan realisasi serta pertumbuhan APBD Kota Malang tahun 2003–2004 disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 1 Target dan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2000–2004

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prestasi (%)
2000	102.033.202.694	100.932.175.757	98,92
2001	276.039.550.520	268.259.237.486	97,18
2002	303.628.828.331	314.799.738.453	103,68
2003	317.368.456.919	355.680.014.254	105,77
2004	339.561.311.285	352.644.069.247	103,85
Rata-rata			101,88

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Tabel 2 Pertumbuhan Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2000–2004

Tahun	Realisasi APBD (Rp)	Pertmb (%)
2000	100.932.175.757	
2001	268.259.237.486	183,62
2002	314.799.738.453	17,35
2003	355.680.014.254	12,99
2004	352.644.069.247	- 0,85
Rata-rata		53,28

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prestasi (%)
2000	97.980.202.694	96.186.649.145	98,18
2001	267.633.550.520	246.706.613.271	92,18
2002	284.350.203.531	287.900.174.377	101,26
2003	317.368.456.919	335.700.867.498	105,78
2004	339.561.311.285	352.644.069.247	103,85
Rata-rata			100,25

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Tabel 4 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Pertmb (%)
2000	96.186.649.145	
2001	246.706.613.271	2,47
2002	287.900.174.377	2,88
2003	335.700.867.498	3,36
2004	352.644.069.247	3,53
Rata-rata		3,06

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Tabel 5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Malang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prestasi (%)
2000	97.980.202.694	90.479.372.977	92,34
2001	267.633.550.520	231.389.405.113	86,46
2002	284.350.203.531	262.047.487.713	92,16
2003	343.549.300.283	329.289.949.997	95,85
2004	378.881.664.535	362.175.130.464	95,59
Rata-rata			92,48

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Tabel 6 Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Malang

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Pertmb (%)
2000	90.479.372.977	
2001	231.389.405.113	2,31
2002	262.047.487.713	2,62
2003	329.289.949.997	3,29
2004	362.175.130.464	3,62
Rata-rata		2,96

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Malang diolah

Memperhatikan Tabel 1 dan 2, tampak bahwa pencapaian target APBD Kota Malang dari tahun 2000–2004 rata-rata sebesar 101,88% (melampaui dari yang dianggarkan). Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2001 (97,18%), dan pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2003 (105,77%). Walau demikian, bila dilihat dari pertumbuhan dalam pencapaian target, dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, bahkan terjadi pertumbuhan minus dari tahun 2003 ke tahun 2004. Sementara itu, pertumbuhan pencapaian target sangat fantastis terjadi dari tahun 2000 ke 2001 (183,62%), namun terjadi pertumbuhan minus dari tahun 2003 ke 2004 (-0,85%). Namun, pertumbuhan APBD rata-rata sebesar 53,28%.

Memperhatikan Tabel 3 dan 4, tampak bahwa pencapaian target Pendapatan Daerah Kota Malang dari tahun 2000–2004 rata-rata sebesar 100,25% (melampaui dari yang dianggarkan). Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2001 (92,18%), dan

pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2003 (105,78%). Pertumbuhan realisasi pendapatan menunjukkan selalu meningkat, dan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,06%.

Memperhatikan Tabel 5 dan 6, tampak bahwa pencapaian target Belanja Daerah Kota Malang dari tahun 2000–2004 rata-rata sebesar 92,48% (berarti terjadi efisiensi). Pencapaian efisiensi terendah terjadi tahun 2003, dan pencapaian efisiensi tertinggi terjadi tahun 2001. Pertumbuhan realisasi belanja menunjukkan selalu meningkat, dan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,96%.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, belum diketahuinya potensi sesungguhnya yang dapat dicapai; *kedua*, dasar penentuan target yang kurang tepat, masih mendasarkan pada data historis (realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya); *ketiga*, sumber daya untuk menggali sumber-sumber penerimaan tersebut belum tersedia dengan baik; *keempat*, sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai; dan *kelima*, pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif.

Realisasi APBD dan PAD

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan daerah lain dalam mencapai cita-cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata di dalam mengukur tingkat kemandirian Pemkot Malang dapat dilakukan antara lain dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan realisasi APBD.

Tabel 7 Realisasi APBD dan Realisasi PAD Kota Malang Tahun 2000–2004

Thn	APBD	PAD	Kontribusi PAD terhadap APBD
2000	100.932.175.757	16.542.142.860	16,39%
2001	268.259.237.486	27.987.060.189	10,43%
2002	314.799.738.453	39.733.293.742	12,62%
2003	355.680.014.254	42.074.121.356	12,53%
2004	352.644.069.247	50.007.305.103	14,18%
Rata-rata			13,23%

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Memperhatikan Tabel 7 di atas tampak bahwa, PAD hanya mampu memberikan kontribusi terhadap APBD selama tahun 2000–2004 rata-rata sebesar 13,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian

daerah masih sangat jauh dari yang diharapkan, karena kemampuan PAD baru mencapai 13,23%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bilamana menggunakan indikator PAD, maka Pemkot Malang dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah adalah belum mampu. Walau demikian, dengan penuh optimisme dan semangat otonomi daerah, roda pemerintahan daerah tetap berjalan.

Target dan Realisasi PAD serta Pertumbuhannya

Dengan semangat otonomi, keuangan daerah jangan bergantung pada keuangan pusat maupun pinjaman daerah. Sumber keuangan asli daerah harus menjadi andalan utama bagi pembiayaan APBD. Data target dan realisasi PAD Kota Malang tahun 2000–2004 disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 8 Target dan Realisasi PAD Kota Malang Tahun 2000–2004

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prestasi (%)
2000	18.458.146.312	16.542.142.860	89,62
2001	25.655.916.800	27.987.060.189	109,09
2002	33.959.253.700	39.733.293.742	117,00
2003	40.764.605.200	42.074.121.356	103,21
2004	49.528.288.300	50.007.305.104	100,97
Rata-rata			103,97

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Tabel 9 Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Malang Tahun 2000–2004

Tahun	Realisasi PAD	Pertmb (%)
2000	16.542.142.860	
2001	27.987.060.189	69,18
2002	39.733.293.742	41,97
2003	42.074.121.356	5,89
2004	50.007.305.103	18,86
Rata-rata		33,98

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Memperhatikan Tabel 8 dan 9, tampak bahwa pencapaian target PAD Kota Malang dari tahun 2000–2004 rata-rata sebesar 103,97% (melampaui dari yang dianggarkan). Pencapaian target terendah diperoleh tahun 2000 (89,62%), dan pencapaian target tertinggi diperoleh tahun 2002 (117,00%). Walau demikian, bila dilihat dari pertumbuhan dalam pencapaian target, pertumbuhan dari tahun ke tahun menunjukkan turun naik. Pertumbuhan pencapaian target tertinggi terjadi dari tahun 2000 ke 2001 (69,18%), dan pertumbuhan terendah terjadi dari tahun 2002 ke 2003 (5,89%). Hal ini mengindikasikan bahwa

pemungutan pajak dan retribusi masih belum dilakukan secara optimal.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, belum diketahuinya potensi sesungguhnya yang dapat dicapai; *kedua*, dasar penentuan target yang kurang tepat, masih mendasarkan pada data historis (realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya); *ketiga*, sumber daya untuk menggali sumber-sumber penerimaan tersebut belum tersedia dengan baik; *keempat*, sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai; dan *kelima*, pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif.

Kontribusi Masing-masing Jenis PAD terhadap Total PAD

Data Kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD tahun 2000–2004 disajikan dalam Tabel berikut.

Memperhatikan Tabel 10, tampak bahwa kontribusi masing-masing jenis PAD terhadap total PAD Kota Malang dari tahun 2000–2004 menunjukkan bahwa Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar,

yaitu rata-rata sebesar 47,96%, disusul oleh Retribusi Daerah sebesar 33,76%, selanjutnya Bagian Laba BUMD, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah, masing-masing sebesar 10,34%, dan 7,94%.

Berdasarkan kondisi di atas, setidaknya ada dua hal yang dipandang mempunyai arti strategis, yaitu: *pertama*, pertumbuhan PAD Kota Malang perlu lebih ditingkatkan; *kedua*, dalam kaitannya dengan penetapan skala prioritas penggalan sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari PAD perlu mempertimbangkan pertumbuhan dan kontribusi terhadap PAD.

Pertumbuhan Masing-masing Jenis PAD

Informasi mengenai tingkat pertumbuhan PAD bermanfaat dalam rangka penentuan skala prioritas penanganan yang berkaitan dengan upaya penggalan sumber penerimaan daerah yang berasal dari PAD.

Berdasarkan Tabel 11 tampak bahwa, selama periode tahun 2000–2004 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Kota Malang secara rata-rata menunjukkan bahwa Pajak Daerah paling tinggi, yaitu sebesar 52,62%, disusul Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 30,70%, selanjutnya Retribusi Daerah

Tabel 10 Kontribusi Masing-masing Jenis PAD terhadap Total PAD Kota Malang

No	Jenis	2000 (Rp)	Kontr %	2001 (Rp)	Kontr %
1	Pajak Daerah	7.030.317.604	42,50	13.284.936.099	47,47
2	Retr. Daerah	6.004.282.655	36,30	9.751.680.288	34,84
3	Bag. Laba BUMD	2.014.146.312	12,18	3.412.500.400	12,19
4	Pendpt. lain-2 yg Sah	1.493.396.289	9,02	1.537.943.400	5,50
T o t a l		16.542.142.860	100	27.987.060.188	100

No	Jenis	2002 (Rp)	Kontr %	2003 (Rp)	Kontr %
1	Pajak Daerah	19.389.931.644	48,80	20.267.760.378	48,17
2	Retr. Daerah	13.005.370.756	32,73	14.340.992.481	34,09
3	Bag. Laba BUMD	4.019.381.400	10,12	3.786.000.000	9,00
5	Pendpt. lain-2 yg Sah	3.318.609.942	8,35	3.679.368.497	8,74
T o t a l		39.733.293.742	100	42.074.121.356	100

No	Jenis	2004 (Rp)	Kontr %	Rata-rata Kontr %
1	Pajak Daerah	26.409.533.752	52,81	47,96
2	Retr. Daerah	15.408.372.301	30,81	33,76
3	Bag. Laba BUMD	4.148.915.570	8,19	10,34
4	Pendpt. Lain-2 yg Sah	4.040.483.480	8,08	7,94
T o t a l		50.007.305.103	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

Tabel 11 Pertumbuhan PAD Kota Malang menurut Jenis Objek Penerimaan Tahun 2000–2004

Tahun	Pajak Daerah	%	Retribusi Daerah	%
2000	7.030.317.604		6.004.282.655	
2001	13.284.936.099	88,97	9.751.680.288	62,41
2002	19.389.931.643	45,95	13.005.370.756	33,37
2003	20.267.760.378	45,27	14.340.992.481	10,27
2004	26.409.533.752	30,30	15.408.372.301	7,44
Rata-2		52,62		28,37

Tahun	Bag Laba BUMD	%	Pendptn Lain-2 yg sah	%
2000	2.014.146.312		1.493.396.289	
2001	3.412.500.400	69,43	1.537.943.400	2,98
2002	4.019.381.400	17,78	3.318.609.941	115,78
2003	4.076.407.120	1,42	3.388.961.376	2,12
2004	4.148.915.570	0,18	4.040.483.480	1,92
Rata-2		22,20		30,70

Sumber: Sekretariat DPRD Pemkot Malang diolah

sebesar 28,37%, dan Bagian Laba BUMD sebesar 22,20%.

Atas dasar penjelasan mengenai peranan dan pertumbuhan objek penerimaan terhadap PAD yang telah diuraikan di atas, maka guna memperoleh hasil yang optimal dalam penetapan skala prioritas pelaksanaan penggalan terhadap jenis objek penerimaan, sebaiknya bukan hanya didasarkan pada tingkat pertumbuhan, tetapi juga berdasarkan pada kontribusi atau peranan masing-masing objek terhadap PAD.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Untuk mengetahui sampai seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah Kota Malang, disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12 Kontribusi PAD Kota Malang terhadap Belanja Daerah Tahun 2000–2004

Tahun	PAD (=A)	Belanja (=B)	Kontr PAD terhdp Belanja
2000	16.542.142.860	88.100.541.902	18,78%
2001	27.987.060.189	177.337.342.765	15,78%
2002	39.733.293.742	256.278.850.913	15,50%
2003	42.074.121.356	321.259.344.334	13,10%
2004	50.007.305.104	346.932.867.489	14,41%
Rata-rata			15,51%

Sumber: Sekretariat DPRD dan Kantor Dispenda Pemkot Malang diolah

Kemampuan PAD Kota Malang dalam membiayai pengeluaran dapat ditunjukkan oleh besarnya angka rasio antara PAD terhadap pengeluarannya.

Berdasarkan Tabel 12, tampak bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluarannya selama tahun 2000–2004 rata-rata 15,51%, jauh dari yang diharapkan. Dari tahun 2000–2003 kontribusinya menurun.

Dari uraian di atas terkandung makna bahwa, tingkat ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang terhadap sumber keuangan lain dapat dikatakan masih tinggi. Untuk itu, dalam rangka otonomi daerah seharusnya penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan daerah lebih dioptimalkan lagi.

PEMBAHASAN

Dari apa yang telah diuraikan di atas, secara umum menunjukkan bahwa penerimaan keuangan daerah Kota Malang yang bersumber dari PAD masih belum mampu menopang pengeluaran daerah.

Banyak hal dapat dijelaskan sehubungan dengan mengapa PAD Kota Malang masih belum mampu untuk menopang pengeluaran daerah. Untuk itu berikut diidentifikasi faktor-faktor penyebab yang menjadikan PAD Kota Malang belum bisa diraih secara optimal.

Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Yang dimaksudkan dalam identifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya PAD Kota Malang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

Faktor penyebab langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi, maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi:

- Masih belum realistiknya dalam penentuan target PAD.
- Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
- Berkurangnya jenis objek penerimaan.

Faktor penyebab tidak langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka tidak akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran, namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:

- Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis.
- Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
- Pelayanan operasional di lapang belum dilaksanakan secara prima.
- Terbatasnya sumberdaya di lapang.
- Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional.
- Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan.
- Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
- Diberlakukannya UU No. 18 Tahun 1997.

Dari uraian di atas secara ringkas disajikan dalam gambar di lampiran 1.

Upaya Pemecahan Penyebab Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Sesuai dengan faktor-faktor penyebab langsung maupun tidak langsung yang diuraikan di atas, maka berikut akan dilakukan analisis untuk pemecahan masalah agar penerimaan PAD Kota Malang dapat diraih secara optimal dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pemecahan masalah terhadap faktor penyebab langsung adalah sebagai berikut.

- Mengupayakan agar dalam penentuan target PAD dilakukan secara lebih realistis.
- Mengeliminir tingkat kebocoran dan kelolosan.

- Mengupayakan agar jenis objek penerimaan yang berasal dari pajak maupun retribusi yang jumlahnya berkurang, dapat ditingkatkan kembali. Pemecahan masalah terhadap faktor penyebab tidak langsung, adalah sebagai berikut.

- Mengupayakan agar dalam penentuan target tidak didasarkan pada data historis.
- Mengefektifkan pemberlakuan sanksi.
- Mengupayakan tersedianya pelayanan prima.
- Mengupayakan tidak adanya birokrasi dalam pelayanan.
- Mengupayakan penambahan petugas operasional yang memadai dan kompeten.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- Mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan di lapang.
- Mengupayakan tersedianya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
- Peninjauan kembali terhadap UU No. 18 Tahun 1997.

Dari uraian di atas secara ringkas disajikan dalam Gambar di lampiran 2.

Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Potensi PAD

Upaya yang bisa dilakukan dalam mengelola sumber potensi PAD untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Malang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, adalah memperhatikan pola kecenderungan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah di masa lalu dan perkembangan ekonomi daerah terutama yang berkaitan dengan bentuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Sering dijumpai keadaan di mana penentuan target penerimaan PAD tidak didasarkan pada rumusan yang jelas, sehingga besarnya target satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya tidak mengikuti tren yang "smooth", melainkan mengikuti gerakan yang sangat fluktuatif. Tajamnya fluktuatif penetapan target ini menggambarkan situasional yang dihadapi pada saat itu. Dengan berlandaskan pada pemikiran seperti ini, maka tidak konsistennya perumusan target dari suatu item pajak, misalnya, dapat digunakan sebagai alasan untuk menyatakan bahwa pemungutan item pajak tersebut belum optimal sehingga diperlukan usaha-usaha intensifikasi.

Di samping didasarkan pada pola kecenderungan penetapan target, usaha intensifikasi dari suatu item PAD juga bisa didasarkan pada pola kecenderungan realisasi. Bila ada lonjakan yang besar dalam realisasi penerimaan suatu item pajak (dibandingkan dengan periode sebelumnya), maka jelas ada sesuatu yang belum diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang berkompeten dengan pemungutan pajak. Adanya sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya ini, mengindikasikan bahwa petugas pajak belum memiliki informasi yang benar tentang potensi pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, usaha-usaha intensifikasi, baik yang menyangkut tentang perbaikan sistem pemungutan maupun sistem pendataan potensi, perlu dilakukan. Karena hal ini akan mampu memberikan sumbangan yang besar terhadap peningkatan keuangan daerah. Disamping intensifikasi pajak, intensifikasi terhadap retribusi daerah perlu dilakukan, mengingat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD Kota Malang relatif besar. Oleh karena itu, penelitian yang diarahkan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi sangat diperlukan. Ada indikasi beberapa pemungutan retribusi (misalnya retribusi parkir) masih banyak mengalami kebocoran. Penelitian yang diarahkan untuk menciptakan sistem pemungutan yang efisien dan aman akan sangat membantu dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Secara detail upaya intensifikasi dijelaskan sebagai berikut.

Upaya Intensifikasi

Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti (Dedy, dalam Halim, 2004:109). Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya, yaitu meliputi.

Menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi pengelola PAD (Dispenda), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur Mapatda. Dengan berlakunya Sistem Mapatda, organisasi Dispenda yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendapatan daerah, tidak lagi berorientasi pada sektor/bidang pungutan (*by object*) tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi (*by function*) dalam organisasinya, yaitu

fungsi pendaftaran dan pendataan, fungsi penetapan, fungsi pembukuan dan pelaporan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional.

Menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi: penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian, yang meliputi:

- pengawasan dan pengendalian yuridis, dengan meneliti apakah pungutan PAD (khususnya pajak dan retribusi) tersebut telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.
- pengawasan dan pengendalian teknis, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran serta peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib pajak/retribusi.
- pengawasan dan pengendalian penata-usahaan, ditujukan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola PAD, dilakukan antara lain dengan mengikut sertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah, juga program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang kompeten.

Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi ataupun selebaran, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.

Upaya Ekstensifikasi

Di samping melalui usaha-usaha intensifikasi, maka peningkatan kemampuan keuangan daerah juga bisa ditempuh melalui usaha-usaha ekstensifikasi, yaitu dengan cara menemukan sumber pendapatan potensial yang belum dieksploitasi. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat perkembangan ekonomi selalu dibarengi oleh munculnya aktivitas-aktivitas baru yang bisa ditetapkan sebagai objek pajak atau retribusi baru. Oleh karena itu, mengamati perkembangan aktivitas baru dari kegiatan ekonomi masyarakat merupakan

langkah awal untuk menemukan sumber-sumber pajak atau retribusi baru yang mungkin bisa dikembangkan Pemerintah Daerah Kota Malang. Secara detail upaya ekstensifikasi dijelaskan sebagai berikut.

Ekstensifikasi PAD adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat (Dedy, dalam Halim, 2004:109). Secara eksplisit kemungkinan ekstensifikasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kota Malang dalam rangka otonomi daerah ditinjau dari aspek kemampuan keuangan daerah adalah belum mampu, karena PAD dalam lima tahun terakhir hanya mampu memberikan kontribusi relatif kecil terhadap APBD, sehingga ketergantungan Pemkot Malang terhadap sumber keuangan lain masih tinggi.

Sumber-sumber PAD yang berpotensi dapat dikembangkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah, karena keduanya memberi kontribusi terhadap total PAD paling besar.

Kendala-kendala yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD antara lain: (1) masih belum realistisnya dalam penentuan target PAD, karena sistem penentuan target didasarkan pada data tahun sebelumnya dan belum mempunyai *data base* tentang potensi; dan (2) masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan, karena sangsi belum efektif, sarana dan prasarana belum memadai, pelayanan belum prima.

Saran

Dalam penentuan target PAD diupayakan agar dilakukan secara lebih realistis, didasarkan data potensial bukan didasarkan pada data historis.

Mengeliminir tingkat kebocoran dan kelolosan dengan mempertegas pemberlakuan sangsi, dan meningkatkan sistem pengawasan.

Meningkatkan pelayanan prima, menambah sarana dan prasarana serta meningkatkan kompetensi aparatur.

Melakukan upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui:

Penyesuaian aspek organisasi pengelola PAD (Dispenda), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Penyesuaian aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional meliputi:

Peningkatan pengawasan dan pengendalian meliputi: pengawasan dan pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis, dan pengawasan dan pengendalian penata-usahaan.

Peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

Melakukan upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan cara menemukan sumber pendapatan potensial yang belum dieksploitasi mengingat perkembangan ekonomi selalu dibarengi oleh munculnya aktivitas-aktivitas baru yang bisa ditetapkan sebagai objek pajak atau retribusi baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonymous. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Anonymous. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anonymous. 2000. *Penyusunan Penelitian Potensi Keuangan Daerah*. Pemkot Malang dan FE Unibraw.
- Badjuri, H.A. 1997. *Dinamika Politik Nasional (Kumpulan Tulisan)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bawazir, F. 1996. *Pungutan pada Dunia Usaha, Sari Kajian Fiskal dan Monete*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Devas, N. 1999. *Financing Local Government in Indonesia, Planning and Administration (Asia & Pasific Special)*. IULA. Ohio University.
- Due, F.J., dkk. 1983. *Government Finance*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fauzi, A., dan Iskandar, E. 1995. *Cara membaca APBD*. Malang: PT Danar Wijaya, Brawijaya University Press.
- Faisal, S. 1992. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gie, T.L. 1982. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Hoessein, B. 2000. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggapan terhadap Aspirasi*

- Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi*. Usahawan No. 04 TH XXIX April. Jakarta: Lembaga Management FE-UI.
- Ichsan, C. 1996. *Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. UP3R-Fakultas Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Kaho, J.R. 1995. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koswara. 1998. *Kebijakan Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah*. Jakarta: LP3ES.
- Kristiadi, J.B. 1991. *Masalah Sekitar Pendapatan Daerah*. Prisma. tahun XIV. Jakarta: LP3ES.
- Lains, A. 1985. *Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru*. Prisma No. 4 April. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, S.M. 1975., *Pergeseran Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni.
- Mamesah, D.J. 1995 *Sistem Administrasi Keuangan di Daerah*. Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- Mahwood, P. 1983. *Local Government in the Third World, The Experience of Tropical of Africa*. New york: John Weley & Sons.
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pontjowinoto, D.M.P. 1991. *Alternatif Reformasi Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Prisma No. 8 Agustus. Jakarta: LP3ES.
- Rejo, I. 1995. *Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan PAD*. Mimeo. Riau: Makalah pada Seminar Otonomi Dati II. Bangkinang.
- Santoso, B. 1995. *Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah*. Prisma. No. 4 April. Jakarta: LP3ES.
- Sumodiningrat, G. 1997, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, (Pengelolaan Keuangan Daerah: Mendukung Pemberian Otonomi Daerah)*, Edisi Kedua. Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Supriatma, T. 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilo, dan Halim, A. 2002. *Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Malang)*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 3, Nomor 2, Agustus. Program Pascasarjana. Magister Manajemen. Malang: Universitas Gajayana.
- Syamsi, I. 1983. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tambunan, B.S. 1996. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Rena Parawira.
- Tjokroamidjojo, B. 1993. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tuene, H. 1995. *Local Government and Democratic Political Development*. ANNAL Journal. APPS. July.
- Usman, M. 1997. *Peran PAD dalam APBD: Studi Evaluasi Kebijakan Peningkatan PAD Kodya Bandar Lampung*. Tesis. Malang: Program Pascasarjana, UNIBRAW.